*Kata kunci*: Pendidikan, *Human Capital*, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Penyerapan Tenaga Kerja.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan menjadi salah satu negara dengan masalah ketenagakerjaan. Masalahnya adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi, hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan tenaga kerja pada pasar, tapi penawaran tenaga kerja tadi tidak diiringi dengan permintaan tenaga kerja yg mampu menyerapnya, sehingga menimbulkan masalah yang diistilahkan dengan pengangguran (Bustam, 2016). Menurut Todaro dan Smith (2006) ketenagakerjaan mengacu pada penerimaan tenaga kerja untuk suatu pekerjaan, atau kondisi yang menjelaskan adanya pekerjaan yang dapat dimiliki pencari kerja. Tenaga kerja yang diserap merupakan sejumlah tenaga kerja tertentu yang dipekerjakan oleh departemen atau unit usaha tertentu. Berdasarkan Undang-undang No 13 Republik Indonesia tahun 2003 menyatakan ketenagakerjaan ialah semua hal nan berkaitan dengan adanya angkatan kerja dari sebelum, sedang, serta setelah bekerja. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan tidak lepas dari isu-isu seperti kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja. Kurniasih (2017) berpendapat bahwa jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan juga akan meningkat kecuali didukung dengan penyediaan lapangan kerja bagi penduduk produktif. Dengan meningkatnya tingkat lapangan kerja, sejumlah besar pekerja akan mengikuti, karena hal ini berpotensi mengurangi jumlah orang miskin yang berujung pada peningkatan kekayaan manusia. Perkembangan sektor perusahaan lain dan institusi Indonesia memerlukan tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai keterampilan tertentu. Bahkan ketika dilakukan oleh spesialis yang berkualitas, pengembangan tetap dilakukan (Kementerian Tenaga Kerja, 2019). Dapat kita lihat bahwa di lima provinsi pada pulau Kalimantan terlihat beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang terus berkembang dalam berbagai bidang ilmu, meskipun belum optimal secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya dididik di tempat asalnya, tenaga kerja yang berasal dari pulau Kalimantan banyak mengenyam pendidikan formal di luar daerah maupun diluar negeri. Oleh karena itu, dengan berbagai peluang, sektor pendidikan Kalimantan dan sumber daya manusia yang berpotensial dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah negara dan mendukung wacana pemindahan ibu kota negara. Menurut Wijaya (2019), jika ibu kota negara memindahkan pusat pemerintahan dari pulau Jawa, maka penanganan yang tepat dalam hal penanggulangan bencana adalah pulau Kalimantan secara letak geografis. Sumber daya manusia di pulau Kalimantan akan dikembangkan secara kualitatif dan kuantitatif dan melampaui modal nasional. Hal ini cocok untuk provinsi yang diprediksi,

karena nantinya akan muncul berbagai suku dan akan menciptakan pemberdayaan SDM yang baik (Kurniadi, 2019).

Ketika ada lebih banyak pekerja yang bekerja sama, produksi akan meningkat. Ini karena lebih banyak orang mengerjakan proyek yang sama, dan produksi ekstra dapat digunakan untuk membuat lebih banyak barang. Sementara itu, populasi besar yang artinya lebih banyak orang yang bisa membeli barang di pasar domestik. Pertumbuhan ekonomi berarti ekonomi semakin besar dan kuat. Ini menjelaskan bahwa semakin banyak pekerjaan dan uang untuk orang yang mencarinya. Pertumbuhan ekonomi berhubungan kuat dengan tingkat produksi. Sebab, pertumbuhan ekonomi menggambarkan bertambahnya output maka bertambah pula barang atau jasa produksi yang diikuti dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi (Lahemba, 2022). Tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh terhadap seberapa besar kemungkinan mereka mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak yang perlu mereka pelajari. Ini adalah situasi di mana banyak permintaan akan pekerja terampil, tetapi tidak banyak pekerja yang tidak terdidik. Ini karena orang telah pindah ke dunia industri dan menjadi terampil di berbagai bidang.

Menurut Sumarsono (2009) ialah penduduk yang terhitung sebagai usia kerja merupakan populasi penduduk usia 15 tahun keatas, jumlah penduduk ini digunakan untuk mengukur kekuatan perekonomian suatu negara. Sedangkan Subri (2003) mengatakan bahwa pekerja ialah seluruh penduduk suatu negara yang bisa menghasilkan barang serta jasa pada saat terdapat permintaan akan tenaga kerja mereka dan mereka ingin berpartisipasi pada aktivitas tersebut. Pada tingkat ekonomi negara, hal ini tercermin dari struktur lapangan kerja utama tenaga kerja dan struktur jenis pekerjaan utama tenaga kerja. Hendri (2001) mengatakan bahwa bila menggunakan status pekerjaan primer untuk mengelompokkan sektor formal serta sektor informal, maka sektor formal adalah mereka yang bekerja sebagai penerima upah dan berusaha mendapatkan bantuan dari pekerja tetap, sedangkan sektor informal ialah mereka yang berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap pekerjaanya meliputi bebas pertanian,bebas non pertanian dan buruh tanpa bayaran.

Rata-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rata 34.58 34.44 38.19 38.57 40.45 39.89 36.99 37.78 ■ Kalimantan Barat 39.13 ■ Kalimantan Tengah 40.37 45.56 41.35 45.67 47.63 48.98 44.20 44.50 44.78 ■ Kalimantan Selatan 36.77 38.20 37.81 38.98 39.92 43.18 39.18 40.37 39.30 ■ Kalimantan Timur 52.14 60.34 55.25 59.96 58.84 58.24 52.86 53.51 56.39 Kalimantan Utara 48.90 56.82 56.98 57.76 57.05 53.31 49.07 49.07 53.62 ■ Pulau Kalimantan 42.55 47.07 45.92 48.19 48.78 48.72 44.46 45.32 46.38 ■ Kalimantan Barat ■ Kalimantan Tengah ■ Kalimantan Selatan ■ Kalimantan Timur ■ Kalimantan Utara ■ Pulau Kalimantan

Gambar 1.1
Tenaga Kerja Formal 5 Provinsi Pada Pulau Kalimantan Tahun 2014-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Berdasarkan tingkat tenaga kerja formal pada gambar diatas yang terletak pada lima provinsi di pulau Kalimantan, pada periode 2014 - 2021 mengalami fluktuasi yang cenderung naik. Berdasarkan data tingkat rata-rata tenaga kerja formal di seluruh provinsi sebesar 46,38% selama periode waktu delapan tahun. Sedangkan tingkat tenaga kerja formal tertinggi yaitu tahun 2018 dengan persentase sebesar 48,78% dengan provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat dominan tertinggi. Serta tingkat tenaga kerja formal terendah pada tahun 2014 dengan persentase 42,55% dengan provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tingkat tenaga formal terendah.

Tingginya tingkat tenaga kerja formal dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh tingkat upah yang tinggi, yang berarti bahwa pengusaha cenderung menggunakan teknologi padat modal yang disebut efek substitusi tenaga kerja dalam proses produksinya untuk menggantikan keperluan terkait tenaga kerja dengan kebutuhan terkait modal seperti mesin (Mankiw, 2001). Menurut Ketenagakerjaan Indonesia (2019) permasalahan yang ada di pulau Kalimantan adalah rendahnya pendidikan yang identik dengan keterbatasan keahlian (low skilled). Sumber daya manusia sangat penting pada proses pembangunan. Kecepatan proses pembangunan bergantung pada seberapa baik sumber daya manusia dimanfaatkan (Sondang, 2012). Di Indonesia, orang yang telah lulus pendidikan berorientasi tenaga kerja dipersiapkan untuk mencari pekerjaan, menjual produk, dan mandiri (Putra, 2018). Semakin tinggi tingkat upah, semakin besar kemungkinan seseorang mau bekerja. Sumber daya manusia mengacu pada keterampilan dan pendidikan yang dimiliki seseorang, hal ini penting karena mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja (Putra, 2018). Sumber

daya manusia juga berpengaruh pada keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh orang melalui pembelajaran di sekolah atau program pelatihan jangka panjang lainnya. Jenis modal ini dapat membantu saat memproduksi barang dan jasa (Kumar, 2006). Sumber daya manusia sangat penting pada proses pembangunan. Kecepatan proses pembangunan bergantung pada seberapa baik sumber daya manusia dimanfaatkan (Putra, 2018). Semakin tinggi tingkat upah, semakin besar kemungkinan seseorang mau bekerja (Schumacher, 2001).

Dengan kepemilikan pendidikan yang lebih tinggi maka akan lebih produktif daripada mereka yang berpendidikan lebih rendah. Ini membuat perusahaan lebih mempekerjakan lebih banyak orang, yang menghasilkan lebih banyak produktivitas. Jika seseorang memiliki lebih tingkat pendidikan, maka lebih besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Mankiw (2001) mengatakan bahwa pendidikan yang baik untuk mencari pekerjaan. Rata-rata lama sekolah di suatu negara adalah jumlah tahun yang dihabiskan penduduk dalam pendidikan formal. Penduduk yang tergolong rata-rata lama bersekolah adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, dengan asumsi orang tersebut telah menyelesaikan pendidikan mereka dengan standar internasional pada usia 25 tahun dihitung sebagai lama sekolah rata-rata. Berikut disertakan data rata-rata lama sekolah untuk dijadikan tolak ukur dalam kualitas *Human capital* yang dimiliki:

Gambar 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah di 5 Provinsi Pada Pulau Kalimantan Tahun 2014-2021 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), diolah

Berdasarkan tingkat rata-rata lama sekolah pada gambar diatas yang terletak di lima provinsi pulau Kalimantan, pada periode 2014 - 2021 mengalami kenaikan Rata-rata lama sekolah seluruh provinsi diketahui ialah selama 8,65 tahun selama periode waktu delapan tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah terlama terdapat di tahun 2021, selama 9,05 tahun dengan provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat dominan tahun terlama memperoleh pendidikan tertinggi. Serta rata-rata lama sekolah paling rendah terdapat di tahun 2014, selama 7,93 tahun dengan provinsi Kalimantan Barat yang memiliki tingkat dominan terendah tahun untuk memperoleh pendidikan.

Tingkat kualitas pada diri seseorang didasarkan pada berapa lama seseorang mengenyam di sekolah. Lamanya waktu yang dihabiskan siswa di sekolah merupakan indikasi seberapa baik suatu bangku sekolah untuk menimba ilmu pendidikan. Pendidikan adalah cara untuk menunjukkan seberapa baik seseorang telah belajar dan dapat menggunakan pengetahuan mereka. Kemampuan seseorang untuk bekerja didasarkan pada kualitas sumber daya manusianya seperti pendidikan dan keterampilan, Putra (2018). Pertumbuhan ekonomi merupakan cara untuk memperbaiki keadaan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi berarti kondisi ekonomi negara yang mampu mengarahkan kondisi lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan tanda bahwa perekonomian kita berjalan dengan baik dan terus tumbuh yang diwujudkan dengan bertambahnya pendapatan nasional. Adapun pertumbuhan ekonomi sebagai syarat dalam keberhasilan pembangunan ekonomi (Putra, 2018). Terdapat tiga indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat yaitu pengumpulan modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Pada pengumpulan modal baik itu investasi yang baru berupa tanah, peralatan fisik, dan human capital yang diperbaiki dalam bidang kesehatan, pendidikan serta kualitas kerja. Pertumbuhan jumlah penduduk juga dapat menambah angka angkatan kerja. Perkembangan teknologi secara luas merupakan suatu upaya baru dalam menyelesaikan pekerjaan (Todaro, 2006).

Sadono (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi perekonomian yang diwujudkan dengan peningkatan pendapatan nasional. Kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, ketika imbalan nyata atas penggunaan faktor-faktor produksi lebih tinggi dalam satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, hal itu harus mengarah pada standar hidup yang jauh lebih tinggi dan lebih banyak pekerjaan. Sementara itu, berdasarkan Badan

pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi pada suatu wilayah. Nilai tambah yg didapatkan artinya nilai tambah yang didapatkan dari perpaduan antara faktor produksi serta bahan baku pada proses produksi. Nilai tambah bruto disini meliputi unsur pendapatan faktor, termasuk upah dan gaji. Bunga, sewa dan laba , penyusutan serta pajak tidak langsung. Berikut disertakan data PDRB untuk dijadikan tolak ukur tingkat pertumbuhan ekonomi dari lima provinsi :

Rata-2014 2017 2018 2019 2021 2015 2016 2020 Rata ■ Kalimantan Barat 5.03 4.88 5.20 5.17 5.07 5.09 -1.82 4.80 4.18 ■ Kalimantan Tengah 6.21 7.01 6.35 6.73 5.61 6.12 -1.41 3.59 5.03 ■ Kalimantan Selatan 4.84 3.82 4.40 5.08 4.09 -1.82 3.48 3.65 5.28 Kalimantan Timur 4.70 1.71 -1.2 -0.38 3.13 2.64 -2.90 2.55 1.28 ■ Kalimantan Utara 8.18 3.40 3.55 6.80 5.36 6.89 -1.09 3.98 4.63 ■ Pulau Kalimantan 3.75 5.19 3.58 3.82 5.42 4.75 5.38 -1.81 3.68 ■ Kalimantan Tengah ■ Kalimantan Selatan ■ Kalimantan Barat

■ Kalimantan Timur ■ Kalimantan Utara ■ Pulau Kalimantan

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi di 5 Provinsi Pada Pulau Kalimantan Tahun 2014-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada gambar diatas yang terletak di lima provinsi pada pulau Kalimantan periode 2014 - 2021 mengalami fluktuasi yang. Dari data tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi diketahui sebesar 3,75% selama periode waktu delapan tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2017, sebesar 5,42% dengan provinsi Kalimantan Utara yang memiliki tingkat dominan tertinggi. Serta tingkat pertumbuhan ekonomi paling rendah ada pada tahun 2020, sebesar -1,81% dikarenakan terdampak pandemic COVID-19 telah mengganggu perekonomian di banyak wilayah, dengan provinsi Kalimantan Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi terendah sehingga diketahui banyak usaha kecil merugi karena wabah COVID-19. Pembatasan kegiatan karena COVID-19 menimbulkan dampak buruk bagi ekonomi nasional (Hadiwardoyo, 2020). COVID-19 dapat berdampak besar pada perekonomian, akibatnya orang-orang di-PHK. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan beberapa perusahaan bahkan bangkrut karena resesi. Total ada 114.340 PHK di negara ini, dan

1.943.916 pekerja terkena dampaknya, hal ini termasuk 77% dari sektor formal serta 23% dari sektor informal (Kemnaker, 2020).

Modal manusia adalah ukuran kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Ini mencakup hal-hal seperti pendidikan dan keterampilan. Faktor produksi ini sangat penting karena tidak akan habis jika digunakan, dijual, atau dimanfaatkan. Seringnya pemakaian faktor produksi tersebut, maka akan semakin bernilai. Faktor produksi inilah yang digunakan untuk mendapatkan upah. Ketika pekerja dibayar banyak, akan ada lebih banyak orang yang tersedia untuk melakukan pekerjaan. Dan ketika ada lebih banyak orang yang tersedia, bisnis akan dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. Ketika tingkat upah tinggi, banyak persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga jumlah orang yang mencari pekerjaan juga tinggi. Artinya penawaran tenaga kerja (penduduk yang bersedia bekerja) tinggi, dan upah bisa lebih tinggi (Putra, 2018).

Sumarsono (2002) berpendapat bahwa Upah minimum adalah upah yang ditentukan secara regional, regional dan sektoral. Berdasarkan hal tersebut, upah minimum terdiri dari gaji pokok dan bonus. Upah minimum dasar adalah upah minimum yang diatur secara regional, khusus sektor dan khusus sektor. Berdasarkan peraturan pemerintah, jelas bahwa gaji pokok saja tidak termasuk remunerasi. Sedangkan menurut Case (2005), upah minimum berarti upah terendah yang dapat dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Berikut disertakan data upah minimum provinsi:

Gambar 1.4 Upah Minimum di 5 Provinsi Pada Pulau Kalimantan Tahun 2014-2021 (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021), diolah

Berdasarkan jumlah upah minimum provinsi pada gambar diatas yang terletak pada lima provinsi pada pulau Kalimantan periode 2012-2021 mengalami kenaikan.

Diketahui bahwa tingkat rata-rata tenaga kerja formal di seluruh provinsi sebesar Rp2,314,145 selama periode waktu delapan tahun. Sedangkan jumlah upah minimum provinsi tertinggi ada pada tahun 2021, sebesar Rp2,834,434 dengan provinsi Kalimantan Utara yang memiliki jumlah dominan tertinggi. Serta jumlah upah minimum provinsi paling rendah ada pada tahun 2014, sebesar Rp1,699,257 dengan Kalimantan Barat yang dominan memiliki tingkat upah minimum provinsi terendah. Secara teori dan statistik menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja dan inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap upah minimum provinsi (Muhammad, 2020).

Secara teori tingkat *Human capital* yang meningkat akan membuat penyerapan tenaga kerja juga meningkat, sedangkan secara teori juga bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta secara teori pula jumlah upah minimum provinsi yang meningkat dapat menambah tingkat penyerapan tenaga kerja. Namun berdasarkan data yang ada dalam latar belakang diatas ditemukan hubungan yang berbeda dimana meningkatnya *Human capital* dalam bidang pendidikan tetapi tenaga kerja formal berfluktuasi, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang turun tetapi penyerapan tenaga kerja berfluktuasi serta naiknya tingkat upah minimum provinsi tetapi tingkat tenaga kerja formal mengalami fluktuasi.

## 2. KAJIAN LITERATUR

## 2.1. Teori Penyerapan Tenaga Kerja

Boediono (2000) mengatakan, jika ada permintaan terhadap suatu produk, maka perusahaan yang memproduksi produk tersebut melakukannya karena masyarakat membutuhkan produk tersebut. Jika permintaan akan suatu produk muncul karena orang membutuhkan produk yang diproduksi perusahaan, maka permintaan akan produk tersebut dianggap sebagai "permintaan asli". Artinya, ini didasarkan pada kebutuhan nyata dan tidak hanya didasarkan pada orang yang menginginkan perusahaan menghasilkan lebih banyak uang. Untuk memastikan permintaan tenaga kerja terpenuhi, jika keuntungan perusahaan akan meningkat dengan menambah pekerja baru, maka itulah yang akan mereka lakukan.

Simanjuntak (2001) berpendapat bahwa pada variabel penyerapan tenaga kerja mengungkapkan kerjasama jumlah tenaga para kerja ideal yang memanfaatkan tingkat upah. Permintaan pengusaha pada ukuran pekerjaan yang diperlukan karena individu tidak meningkatkan jumlah produk yang dibuat dan kemudian ditawarkan kepada pelanggan. Dengan perluasan minat industri, perusahaan terhadap pekerjaan bergantung pada peningkatan minat tenaga kerja dan produk yang dibuat.